

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 10 Oktober 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap kliping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas Halaman 1 (1)	Kamis, 10 oktober 2019	Situ Hilang, Bencana Datang	Terdata 208 situ di Jabodetabek yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Namun, tak semuanya benar-benar dikuasai negara di pergunakan untuk kemakmuran rakyat. tercatat 30 situ di antaranya dikuasai perusahaan dan individu melalui sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU).
2	Media Indonesia Halaman 6	Kamis, 10 oktober 2019	Rizal Djali Bantah Atur Proyek SPAM Kementerian PU- Pera	Badan pemeriksa keuangan (BPK) Rizal Djali membantah dirinya mengatur proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PU-Pera). Rizal menegaskan, dirinya tidak memiliki wewenang untuk mengatur proyek di kementerian tertentu.
3	Bisnis Indonesai Halaman 7	Kamis, 10 oktober 2019	Tol Manado, Bitung Dipacu	PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), kelompok usaha PT jasamarga (persero) TBK yang mengelola jalan tol Manado-Bitung, terus mengejar pembangunan jalan tol yang merupakan salah satu proyek stretegis nasional (PNS) ini agar selesai tepat waktu.
4	Bisnis Indonesia Halaman 8 (1)	Kamis, 10 Oktober 2019	Potensi KEK Kendala Di Meja Presiden	Kini, keputusan penarik status menjadi KEK tersebut tinggal menunggu penetapan oleh Presiden Joko Widodo. Pada pertengahan Agustus 2019, PT Kendal Industrial Park (KIP) selaku pihak Pengusul sudah melakukan rapat dengan Dewan KEK, yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian darmin Nasution.
5	Kompas Halaman 13	Kamis, 10 Oktober 2019	KroyokAN Danai SDGs	Kebutuhan dan investasi untuk mencapai target SDGs tahun 2030 di perkirakan mencapai Rp 67.801 triliun. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah mengandeng banyak pihak ntuk berkerja sama guna memenuhi kebutuhan dan melalui skema pembiayaan campuran.
6	Kompas Halaman 16	Kamis, 10 Oktober 2019	Likuefaksi Ancam Kota Besar Indonesia	Fenomena likuefaksi yang dipicu gempa mengancam kota-kota besar di Indonesia dengan Kerentanan sedang hingga tinggi. Peta kerentanan likuefaksi Indonesia diharapkan menjadi acuan untuk penataan ruang berbasis mitigasi.
7	Bisnis Indonesia Halaman 20	Kamis, 10 Oktober 2019	Beleid KEK Likupang Siap Ditekan	Pemerintah bulan ini akan menetapkan kawan Likupang, kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi utara sebagai kawasan Ekonomi khusus (KEK).
8	Bisnis Indonesia Halaman 22	Kamis, 10 Oktober 2019	Pengembangan Masih Tunggu Realisasi	Asosiasi Pengembangan Perumahan dan permungkinan Seluruh Indonesia (Apersi) Masih menunggu realisasi tambahan kouta Fasilitas Likuiditas

1	Kompas Halaman 1 (1)	Kamis, 10 oktober 2019	Situ Hilang, Bencana Datang	Terdapat 208 situ di Jabodetabek yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Namun, tak semuanya benar-benar dikuasai negara di pergunakan untuk kemakmuran rakyat. tercatat 30 situ di antaranya dikuasai perusahaan dan individu melalui sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU).
---	----------------------	------------------------	-----------------------------	--

Situ Hilang, Bencana Datang

Situ-situ di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi terancam hilang. Sejumlah situ dikuasai pengembang dan diperjualbelikan. Akibatnya, bencana banjir bisa datang kapan saja.



JAKARTA, KOMPAS — Terdapat 208 situ di Jabodetabek yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, tak semuanya benar-benar dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Tercatat 30 situ di antaranya dikuasai perusahaan dan individu melalui sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU).

Penguasaan situ lewat penerbitan SHM dan HGB menyebabkan sejumlah situ di Jabodetabek beralih fungsi. Situ tak lagi berfungsi sebagai penampung resapan air ataupun pengendali banjir.

Penelusuran tim Kompas sepanjang September mengungkap, penguasaan situ oleh korporasi dan individu ternyata sudah bertahun-tahun. Pengembang memiliki alas hak dalam bentuk SHM dan HGB, seperti Situ Kayu Antep dan Rompong di Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, ditemukan pula seluas 15 hektar dari 18 hektar lahan Situ Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah dimiliki perusahaan.

>> BACA JUGA:

Alih Fungsi
Alih fungsi lahan menyebabkan terjadinya defisit air permukaan, peningkatan suhu, kekurangan air tanah, penurunan muka tanah, dan pencemaran air.

klik.kompas.id/alihfungsi

an lewat jual-beli 59 girik tahun 2007 dan 2013.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk situ yang menjadi bagian DAS. "Sebanyak 208 situ di Jabodetabek itu pun menjadi kekayaan negara," ujar Bambang, pertengahan September 2019.

Penguasaan situ oleh korporasi dan individu memicu sengketa perdata di pengadilan. Namun, di pengadilan, negara

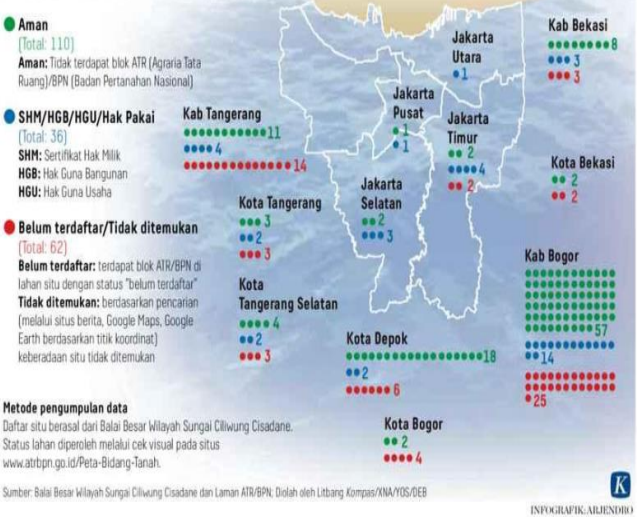
(Bersambung ke him 11 kol 3-5)

klik.kompas.id/rebutansitu



Bekas Situ Kayu Antep yang berubah fungsi dan dimiliki pihak swasta di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/9/2019). Situ Kayu Antep merupakan satu dari beberapa situ di Tangerang Selatan yang beralih fungsi akibat diterbitkannya SHM/HGB (atas). Situ Rompong di Cempaka Putih, Tangerang Selatan, yang terkepung permukiman, Sabtu. Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, luas Situ Rompong menyusut dari awalnya 10 hektar menjadi 2,99 hektar. Penyusutan disebabkan masifnya pembangunan perumahan di kawasan tangkapan air sekaligus pengendali banjir itu (bawah).

Status Lahan Situ Se-Jabodetabek



Situ Hilang, Bencana Datang

(Sambungan dari halaman 1)

hampir selalu kalah.

Dari direktori putusan Mahkamah Agung, bisa diketahui identitas pemegang SHM, HGB, dan dokumen girik yang diterbitkan di atas situ-situ tersebut. Sertifikat untuk Situ Kayu Antep tercatat atas nama PT Hana Kreasi Persada. Di Situ Gunung Putri, PT Fantasi Gunung Putri memperoleh setidaknya 59 dokumen girik yang dibeli dari warga setempat. Adapun Situ Rompong tengah disengketakan di Pengadilan Negeri Tangerang, melibatkan PT Harapan Permai Indonesia (PT Harperindo) selaku pemilik sertifikat tanah dengan Pemkot dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang Selatan.

Tak bisa dimiliki

Selarasnya situ dilarang diperjualbelikan. Pemerintah menetapkan situ sebagai wadah air, kawasan lindung untuk konservasi air, dan pengendali banjir. Pemerintah mencatat 208 situ di Jabodetabek sebagai kekayaan negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Situ itu enggak bisa dimiliki. Baik situ buatan maupun alami, dua-duanya enggak bisa dimiliki. Masyarakat boleh menggunakan, tetapi bukan memiliki," kata Direktur Barang Milik Ne-

gara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan.

Kenyataannya, pemerintah kesulitan menyelamatkan situ-situ di Jabodetabek yang telah diperjualbelikan dan beralih fungsi. Proses peradilan meligitimasi kepemilikan situ oleh pengembang. Direktur Utama PT Hana Kreasi Persada Hendrik Kadarusman mengungkapkan, perusahaannya bukan pihak pertama yang memiliki lahan situ. PT Hana membeli dari ahli waris pihak yang menguasai situ dengan alas hak berupa SHM.

Berkat putusan pengadilan pula, PT Fantasi Gunung Putri yang diwakili Hans Karyose memperoleh legitimasi sebagai pemilik lahan seluas 15 hektar yang teridentifikasi oleh BBWSCC berada di Situ Gunung Putri, Topan Odye Prasetyo, kuasa hukum Hans, menyampaikan, kliennya memiliki seluruh dokumen pelepasan hak atas tanah itu. "Dokumen kami lengkap," ujarnya.

Lewat gugatan perdata di PN Tangerang, lahan Situ Rompong kini tengah diupayakan dapat dimiliki secara utuh oleh PT Harperindo selaku pemegang tiga SHM yang terbit di area situ. Rasyid Tarmizi, wakil dari PT Harperindo, mengungkapkan, ada empat SHM yang terbit di lahan Situ Rompong. Na-

mun, hanya tiga SHM seluas 3 hektar yang dimiliki PT Harperindo.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengusahaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Budi Situmorang mengakui, penerbitan sertifikat lahan situ pada masa lampau bisa menghilangkan keberadaan situ sebagai aset negara. "Ya begitu lah. Kami mengakui bahwa dulu zamannya tidak jelas," katanya.

Hilangnya situ karena berubah fungsi mengakibatkan bencana. Situ Cimang di Depok kini menjadi perumahan Mekar Perdana. Warga perumahan, Sulaeman dan Widarso, menyampaikan, sejak 2005 perumahan itu terus kebanjiran setiap kali musim hujan.

Situ Asem di Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor, sejak 1998 telah menjadi perumahan Tamansari Persada. Sejak itu, menurut Icah, warga setempat, rumahnya dilanda banjir saat hujan deras.

Untuk menyelamatkan situ-situ tersisa di Jabodetabek, pakar hukum agraria Universitas Indonesia, Suparjo, mengingatkan agar BPN tak hanya menjadi lembaga pengukur tanah. BPN diminta tak mudah mengeluarkan sertifikat di area situ. Ia berpendapat, BPN harus aktif menjaga kawasan lindung, termasuk situ. (MDN/ADY/SPW)

2	Media Indonesia Halaman 6	Kamis, 10 oktober 2019	Rizal Djali Bantah Atur Proyek SPAM Kementerian PU- Pera	Badan pemeriksa keuangan (BPK) Rizal Djali membantah dirinya mengatur proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PU-Pera). Rizal menegaskan, dirinya tidak memiliki wewenang untuk mengatur proyek di kementerian tertentu.
---	------------------------------	---------------------------	---	--

Rizal Djali Bantah Atur Proyek SPAM Kementerian PU-Pera

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djali membantah dirinya mengatur proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Rizal menegaskan, dirinya tidak memiliki wewenang untuk mengatur proyek di kementerian tertentu.

"Menteri saja tidak punya kewenangan untuk mengatur proyek apalagi seorang Rizal Djali yang tidak menjadi menteri dan tidak menjadi pimpinan lembaga negara. Saya tidak punya kemampuan dan kapasitas untuk mengatur itu," ucapnya sesuai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin.

Rizal juga menampik sangkaan adanya aliran suap senilai miliaran rupiah dalam bentuk dolar Singapura kepada dirinya. Ia menilai kasus yang menjeratnya sebagai musibah dan tidak ada hubungannya dengan BPK sebagai lembaga. "Saya ingin menegaskan musibah yang sedang saya alami tidak ada kaitannya dengan BPK secara institusi," katanya.

Rizal mengatakan penerbitan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak

BPK sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Dia menyebut tidak ada yang diubah dalam laporan dan tidak ada permintaan uang atas pemeriksaan tersebut.

"Satu huruf pun, satu angka pun tidak ada yang berubah. Kalau ada yang menyangsikan terjadi perubahan, saya dengan tim siap berhadapan dengan pihak yang menduga telah terjadi perubahan itu," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rizal dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo sebagai tersangka baru kasus tersebut. Dalam kasus itu, Rizal diduga turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM Kementerian PUPR yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Rizal diduga menerima suap dari komisaris PT Minarta, Leonardo, sebesar \$100 ribu.

Kasus itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya. KPK menjerat 8 orang sebagai tersangka yang saat ini telah divonis bersalah menerima dan/atau memberikan suap. (Dhk/P-4)

3	Bisnis Indonesia Halaman 7	Kamis, 10 oktober 2019	Tol Manado, Bitung Dipacu	PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), kelompok usaha PT jasamarga (persero) TBK yang mengelola jalan tol Manado-Bitung, terus mengejar pembangunan jalan tol yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PNS) ini agar selesai tepat waktu.
---	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

► Pengerjaan Proyek

Tol Manado–Bitung Dipacu

Bisnis, JAKARTA — PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengelola Jalan Tol Manado–Bitung, terus mengejar pembangunan jalan tol yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PNS) ini agar selesai tepat waktu.

Jalan Tol Manado–Bitung memiliki total panjang 39 km yang dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang terdiri atas dua paket pekerjaan.

Paket 1 sepanjang 14 km merupakan ruas yang didukung konstruksinya oleh Pemerintah (*Viability Gap Fund/VGF*) yang terbagi atas Seksi 1A (Manado–Sukur)

sepanjang 7 km dan Seksi 1B (Sukur–Air Madidi) sepanjang 7 km.

Paket 2 sepanjang 25 Km menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT JMB yang juga terbagi atas dua seksi, yaitu Seksi 2A (Air Madidi–Danowudu) sepanjang 11,5 km dan Seksi 2B (Danowudu–Bitung) sepanjang 13,5 km.

Direktur Utama PT JMB George IMP Manurung mengatakan hingga akhir September, progres konstruksi untuk Paket 2 Air Madidi–Bitung telah mencapai 50,27% dengan pembebasan lahan mencapai 93,20%.

“Untuk masing-masing seksi, progres konstruksi Seksi 2A, Air Madidi–Danowudu, sudah

mencapai 89,40%, sementara itu seksi 2B, Danowudu–Bitung, saat ini progres konstruksi mencapai 31,20%,” jelasnya Rabu (9/10).

George menjelaskan beberapa pekerjaan utama juga dipacu di masing-masing seksi untuk mengejar target penyelesaian konstruksi di Triwulan II tahun 2020.

“Di Seksi 2A kami sedang menyelesaikan pekerjaan Simpang Susun Kauditan, kantor dan gerbang tol yang ditargetkan selesai di akhir tahun 2019. Untuk seksi 2B merupakan penyelesaian pekerjaan jembatan, *crossing*, drainase dan *mainroad* serta Simpang Susun Danowudu yang ditargetkan dapat selesai tahun depan.” (Krizia P. Kinanti)

► Perizinan Badan Usaha

Jasa Konstruksi Asing Terganggu Aturan Menteri

Bisnis, JAKARTA — Pelaku usaha di bidang konstruksi menilai penerapan Peraturan Menteri PUPR No. 9/PRT/M/2019 bakal berdampak pada kelangsungan badan usaha jasa konstruksi (BUJK) asing. Hal ini disebut bakal berdampak langsung pada pemutusan kerja pada perusahaan terdampak.

Sekretaris Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Seluruh Indonesia (Gapensi) Jakarta Erwin Princen Sihite menilai BUJK asing akan sulit memperpanjang sertifikat badan usaha (SBU) karena regulasi yang baru mensyaratkan pemegang saham BUJK asing harus berbentuk badan usaha. Padahal, saat ini ada ratusan pemegang

saat ini ada ratusan pemegang saham perseorangan yang menamakan modal di BUJK.

Syarat tersebut termaktub dalam Pasal 36 Peraturan Menteri PUPR No. 9/PRT/M/2019. Beleid yang mengatur Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing itu berlaku sejak Juni 2019.

“Mereka [BUJK asing] sekarang stagnan karena tidak bisa memperpanjang SBU. LPJK [Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi] tidak mau proses karena ada permen ini,” jelasnya, Rabu (9/10).

Selain harus berbentuk badan usaha, aturan tersebut juga mewajibkan investor asing memiliki jenis usaha dan klasifikasi usaha yang sama dengan mitranya dari investor dalam negeri.

Untuk bisa beroperasi di Indonesia, kontraktor asing memang perlu menggandeng badan usaha lokal. Pemegang saham asing bisa memiliki saham hingga 67% sedangkan 33% dimiliki perusahaan lokal. Secara khusus, untuk investor dari Asia Tenggara, kepemilikan saham maksimal

ditetapkan 70% sedangkan sisanya dimiliki perusahaan dalam negeri.

“Di kita badan usaha PMA [Penanaman Modal Asing] itu pemilik sahamnya perseorangan. Misalnya ada orang Jepang lama tinggal di sini, dia join dengan lokal. Kami upayakan aturan ini boleh ada transisi,” ujarnya.

Erwin menyebut, di DKI Jakarta, terdapat 107 anggota Gapensi yang berasal dari kalangan BUJK asing. Sementara itu, secara nasional, anggota Gapensi dari unsur BUJK asing diperkirakan mencapai 200 badan usaha. Dia mengimbau, bila tidak ada perubahan regulasi, ratusan BUJK asing bakal gulung tikar pada 2021.

Dia beralasan, izin SBU diterbitkan setiap tiga tahun. Dengan kata lain, izin yang diterbitkan pada 2019 bakal berakhir pada 2021. Izin SBU yang diterbitkan sebelum Permen PUPR No. 9/2019 bakal berakhir lebih cepat. Oleh karena itu, kebuntuan perizinan akan berdampak langsung terhadap operasional badan usaha.

“Ada yang [izinnya] habis Desember 2019, ada juga yang 2020 dan 2021. Jadi kalau tidak ada revisi, 2021 nanti BUJK PMA [penanaman modal asing] ini berguguran,” katanya

Tidak Selaras

Direktur Eksekutif Gapensi Setu Albertus menilai beleid BUJK asing tidak selaras dengan kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menurut, Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya persyaratan kerja sama modal dan investasi.

“Kami meminta agar Permen PUPR No. 09/PRT/M/2019

ini dicabut atau dibatalkan,” ujarnya.

Dia membeberkan ketentuan tersebut juga tumpang tindih dengan sejumlah regulasi, antara lain Undang-undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM No. 6/2016. Dua peraturan tersebut menegaskan penanam modal merupakan perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri atau asing.

Berto—panggilan Setu—juga menyebut, penjabaran atas pasal 35 Undang-undang Jasa Konstruksi yang menjadi dasar penerbitan Permen No.9/PRT/M/2019 bertentangan dengan pengaturan di pasal 30 dan pasal 32. Dua pasal itu mengakomodasi badan usaha jasa konstruksi asing atau usaha perorangan jasa konstruksi asing.

Kepala Subdit Usaha jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Suwanto mengatakan pengaturan badan usaha jasa konstruksi asing dalam peraturan menteri telah sesuai dengan Undang-undang Jasa Konstruksi.

Penerbitan Permen PUPR No. 9/PRT/M/2019 itu, katanya, juga telah melalui tahap harmonisasi dengan peraturan-peraturan lain.

“Peraturan ini amanah dari UU No. 2/2019. Jadi isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya [Undang-undang],” jelasnya.

Dia menerangkan, persyaratan pemegang saham atau penanam modal dalam BUJK asing juga merujuk pada Undang-undang Jasa Konstruksi. Dalam pasal 36 Permen PUPR No. 9/PRT/M/2019, pemegang saham BUJK asing harus berbentuk badan usaha. (Rivki Maulana)

4	Bisnis Indonesia Halaman 8 (1)	Kamis, 10 Oktober 2019	Potensi KEK Kendala Di Meja Presiden	Kini, keputusan menarik status menjadi KEK tersebut tinggal menunggu penetapan oleh Presiden Joko Widodo. Pada pertengahan Agustus 2019, PT Kendal Industrial Park (KIP) selaku pihak Pengusul sudah melakukan rapat dengan Dewan KEK, yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian darmin Nasution.
---	--------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---

► KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Potensi KEK Kendal di Meja Presiden

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemangku kepentingan urun rembuk merancang agar Kawasan Industri Kendal menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Hafiyyan
hafiyyan@bisnis.com

Kini, keputusan kenaikan status menjadi KEK tersebut tinggal menunggu penetapan oleh Presiden Joko Widodo.

Pada pertengahan Agustus 2019, PT Kendal Industrial Park (KIP) selaku pihak pengusul sudah melakukan rapat dengan Dewan KEK, yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

KIP merupakan perusahaan *joint venture* PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KJIA) dan pengembangan skala kota asal Singapura, Sembcorp Development Indonesia Ltd., dengan porsi kepemilikan saham masing-masing 51% dan 49%.

Sembcorp adalah perusahaan yang menjadi bagian dari Temasek Holding dan terdaftar di Singapore Exchange. Proyek ini juga menandakan kemesraan hubungan bilateral dan bisnis antara Indonesia dengan Singapura.

Presiden Jokowi pada 8-9 Oktober 2019 melakukan *Leaders' Retreat* dan bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Salah satu poin yang dibahas oleh kedua pimpinan itu ialah proyek KIK.

Sebelumnya pada 2018, Lee Hsien Loong sudah mengusulkan agar KIK menjadi KEK sehingga investasi ke dalam kawasan kian deras. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan KEK Kendal.

"Penetapan Kendal sebagai KEK melalui PP. Saat ini, PP KEK Kendal dalam proses penandatanganan oleh Bapak Presiden [Joko Widodo]," ujar Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoch Suharto Pranoto saat dihubungi *Bisnis*, Rabu (9/10).

Menurutnya, pemerintah memiliki target besar dengan menaikkan status Kendal sebagai KEK. Dalam jangka panjang, diperkirakan KEK Kendal dapat menarik investa-

5 Tahun

- Meraih investasi US\$5 miliar (Rp70 triliun).
- Menghasilkan produk minimal 60% untuk ekspor.
- Melakukan ekspor sejumlah US\$500 juta per tahun.
- Mensubstitusi impor hingga US\$250 juta per tahun.
- Memberdayakan 20.000 tenaga kerja langsung di dalam kawasan.

Jangka Panjang

- Meraih investasi Rp274,8 triliun.
- Menyerap 80.000 tenaga kerja.

Sumber: Pemprov Jateng, Dewan Nasional KEK, BISNIS/TRI UTOMO

Target KEK Kendal



si sebesar Rp274,8 triliun, dengan perincian Rp270 triliun investasi dari pelaku usaha, dan Rp4,8 triliun dari pembangunan kawasan.

Adapun, dalam 5 tahun mendatang KEK Kendal ditargetkan meraih investasi sebesar US\$5 miliar atau sekitar Rp70 triliun (kurs Rp14.000 per dolar AS), melakukan ekspor US\$500 juta (Rp7 triliun) per tahun, mensubstitusi impor hingga US\$250 juta (Rp3,5 triliun) per tahun.

"Dalam 5 tahun pertama [sampai 2024], KEK Kendal juga dapat menyerap tenaga kerja 20.000 orang, dan dalam jangka panjang menciptakan dalam jangka panjang menciptakan lapangan kerja bagi 80.000 orang," imbuhnya.

Enoch menambahkan rencana pengembangan KEK Kendal meliputi industri berorientasi ekspor dan substitusi impor, produk berteknologi tinggi (*high tech products/HTP*), aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0, dan sistem logistik yang berbasis Industri 4.0.

Sejak beroperasi pada 2015, KIP berencana mengelola kawasan seluas 2.700 hektare (ha), dengan pengembangan tahap awal seluas 860 ha. Adapun, mengutip laporan keuangan KJIA per Juni 2019, lahan yang sudah siap dibangun mencapai 575 ha.

Dalam keterangan resminya, Bupati Kendal Mirna Anissa menyampaikan komitmennya untuk mendorong pengembangan KEK Kendal yang mencakup lahan seluas 4.500 ha. Pengembangan intensif akan dilakukan dalam 3 tahun ke depan.

"Kami berkomitmen KEK yang akan dibangun di Kabupaten Kendal akan segera dibangun dan dalam 3 tahun ke depan akan selesai seluruhnya," ujarnya.

Sejumlah persiapan infrastruktur juga dilakukan, meliputi pembangunan Pelabuhan Kendal yang terintegrasi dan penyediaan jalur pipa

dan suplai gas Kendal—Semarang.

Selanjutnya, percepatan pembangunan Harbour Toll Road yang direncanakan beroperasi 2023, dan pengembangan bendung karet di Sungai Blorong untuk penyediaan air baku 200 liter per detik.

Mirna berharap keberadaan KEK Kendal turut meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam skala lebih luas, adanya KEK juga membantu target Jawa Tengah mencapai pertumbuhan ekonomi 7%.

Executive Director KIP Didik Purbadi mengatakan, hingga Juli 2019 KIP sudah menyerap investasi sebanyak Rp7,7 triliun dari 56 tenant atau perusahaan. Para penyewa yang berasal dari enam negara berbeda itu menempati lahan seluas 86 ha.

Sejumlah industri utama yang ada di KIK adalah tekstil dan pakaian jadi (fesyen), makanan dan minuman, mebel (furnitur), logistik, serta industri manufaktur elektronik dan otomotif.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenhertian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana mengatakan, pihaknya sudah membuat surat harmonisasi perihal KEK Kendal pada 3 Oktober 2019. Dalam 90 hari sejak surat itu ditandatangani, harus sudah dibentuk Badan Pengembangan Ekonomi Khusus.

"Mudah-mudahan segera ada ketetapan dari Presiden soal KEK di Kendal ini, setelah kami mendatangi surat harmonisasi," imbuhnya.

Penetapan KIK sebagai KEK tentunya diharapkan dapat menggalakan investasi ke dalam kawasan yang kini masih pelan. Per Juni 2019, pendapatan neto KJIA dari KIK hanya mencapai Rp6,31 miliar, turun dari semester 1/2018 senilai Rp16,77 miliar.

Oleh karena itu, diharapkan keputusan kenaikan status tersebut segera disahkan oleh Presiden Jokowi. ■

► Keputusan kenaikan status menjadi KEK tersebut tinggal menunggu penetapan oleh Presiden Joko Widodo.

5	Kompas Halaman 13	Kamis, 10 Oktober 2019	KroyokAN Danai SDGs	Kebutuhan dan investasi untuk mencapai target SDGs tahun 2030 di perkiraan mencapai Rp 67.801 triliun. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah mengandeng banyak pihak ntuk berkerja sama guna memenuhi kebutuhan dan melalui skema pembiayaan campuran.
---	----------------------	------------------------------	------------------------	--

Keroyokan Danai SDGs

Pemerintah menggandeng banyak pihak untuk mendanai program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan dana investasi untuk mencapai target SDGs tahun 2030 di perkiraan mencapai Rp 67.801 triliun. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah menggandeng banyak pihak untuk bekerja sama guna memenuhi kebutuhan dana melalui skema pembiayaan campuran.

"Mengandalkan APBN dari pemerintah tak akan cukup," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro dalam konferensi tahunan SDGs yang digelar Bappenas di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Berdasarkan proyeksi Bappenas dengan skenario intervensi tinggi, Indonesia butuh investasi Rp 2.867 triliun tahun 2020 untuk melaksanakan program SDGs. Pada tahun 2030, kebutuhannya mencapai Rp 10.397 triliun.

SDGs merupakan konsensus negara-negara anggota PBB tentang pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam 17 tujuan. Tujuan itu antara lain menghilangkan kemiskinan di samping tujuan lain mencakup bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri, dan lingkungan hidup.

Kontribusi pemerintah untuk memenuhi pendanaan diharapkan makin kecil, yakni dari 63,4 persen tahun 2020 menjadi 58 persen tahun 2030. Artinya, peran dari pihak-pihak di luar pemerintah ditargetkan se-

makin besar.

Dalam kesempatan itu, Bappenas meluncurkan SDGs Financing Hub untuk menjembatani pihak-pihak penyokong dana dengan proyek-proyek berorientasi SDGs. Harapannya, terwujud kemitraan inklusif dan partisipatif dalam pendanaan.

Pembiayaan bisa menggantikan sejumlah mekanisme atau sumber, seperti filantropi, dana tanggung jawab sosial korporasi, sukuk berwawasan lingkungan, surat utang berwawasan lingkungan, zakat, dana berdampak sosial, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Salah satu proyek sarat nilai SDGs yang memanfaatkan pembiayaan campuran adalah pembangunan dan revitalisasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Jambi. Proyek ini memanfaatkan pembiayaan dari Badan Zakat Nasional, Bank Jambi, Program Pembangunan PBB (UNDP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Provinsi Jambi.

Perlu kepastian

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, pengentasan rakyat miskin di tingkat desa menjadi langkah strategis dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. "Hal ini butuh model bisnis yang mampu melibatkan pihak swasta. Kuncinya, menciptakan com-

mon interest," ujarnya.

Bappenas bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui proyek percontohan pembangunan desa dengan skema pembiayaan *social impact bonds*. Keberhasilan program SDGs di perdesaan diharapkan menjadi contoh pendanaan bersama.

Ekonom senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) sekaligus Presiden United in Diversity Foundation, Mari Elka Pangestu, berpendapat, proyek berorientasi SDGs yang telah berhasil di Indonesia perlu disorot dan diperbanyak.

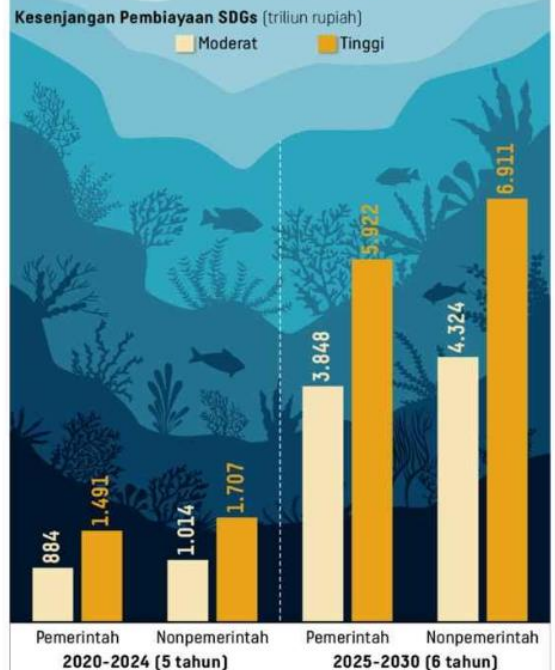
Namun, diperlukan kepastian pengembalian investasi dan analisis risiko proyek. Hal ini penting untuk menggaet swasta dan korporasi agar terlibat dalam program SDGs melalui sistem pendanaan komersial.

Selain itu, pemerintah perlu membuat mekanisme sistem jaminan dan garansi. Menurut Mari, sistem ini dapat memberikan kepastian keamanan investasi bagi aktor swasta dan korporasi.

Menurut Chair of Executive Board of Indonesia Business Council for Sustainable Development Sihol Aritonang, pemerintah perlu menaikkan skala proyek-proyek percontohan SDGs yang berhasil agar dapat direplikasi. (JUD)

Kesenjangan dalam Pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

- Kesenjangan pembiayaan SDGs merupakan kebutuhan investasi tambahan untuk mencapai skenario moderat atau tinggi*.
- Butuh tambahan pembiayaan investasi untuk mewujudkan target-target SDGs.



*Dihitung dengan mencari selisih antara investasi dalam skenario tinggi dan moderat dengan skenario *business as usual*.

Sumber: Indonesia Forum dan Bappenas.



INFOGRAFIK TIRU

6	Kompas Halaman 16	Kamis, 10 Oktober 2019	Likuefaksi Ancam Kota Besar Indonesia	Fenomena likuefaksi yang dipicu gempa mengancam kota-kota besar di Indonesia dengan Kerentanan sedang hingga tinggi. Peta kerentanan likuefaksi Indonesia diharapkan menjadi acuan untuk penataan ruang berbasis mitigasi.
---	----------------------	------------------------------	---	--

Likuefaksi Ancam Kota Besar Indonesia

Telah terbit atlas yang memetakan zona likuefaksi. Hampir semua kota besar di Indonesia terancam dengan kerentanan sedang hingga tinggi.

Peta Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia



PALU, KOMPAS — Fenomena likuefaksi yang dipicu gempa mengancam kota-kota besar di Indonesia dengan kerentanan sedang hingga tinggi. Peta kerentanan likuefaksi diharapkan menjadi acuan untuk penataan ruang berbasis mitigasi.

Tingkat kerawanan likuefaksi terangkum dalam "Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia" yang diterbitkan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Atlas itu diluncurkan di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10/2019). Hadir dalam peluncuran itu Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar, Direktur Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Velix Wanggai, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Hidayat Lamsakate.

Likuefaksi adalah peluluhan

massa tanah akibat guncangan gempa yang menyebabkan tanah kehilangan kekuatan dan menjadi cair. Umumnya, likuefaksi terjadi pada daerah rawan gempa dengan jenis tanah pasir halus dan air tanah yang dangkal.

Atlas diterbitkan dalam skala 1:100.000. Ini atlas lengkap pertama yang dihasilkan Badan Geologi terkait kerentanan likuefaksi. Likuefaksi menghancurkan permukiman di Palu dan Kabupaten Sigi pada gempa 28 September 2018.

Hanya lima dari 34 provinsi di Indonesia yang tak punya zona kerentanan likuefaksi, yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Calon ibu kota baru di Kalimantan Timur aman. Hanya ada kerentanan sedang di pesisir Kutai Timur yang berjarak cukup jauh.

Kategori kerentanan likuefaksi dari rendah (warna hijau), sedang (kuning), hingga tinggi

(merah). Di zona kerentanan tinggi, likuefaksi bisa terjadi merata dan struktur tanah umumnya rusak parah. Empat jenis likuefaksi bisa terjadi, mulai likuefaksi lateral (horizontal), penurunan tanah, semburan pasir, hingga likuefaksi aliran.

Likuefaksi yang biasa terjadi di Indonesia adalah lateral, penurunan tanah, dan semburan pasir. Jenis likuefaksi aliran dengan kerusakan masif baru terjadi pada gempa di Kota Palu, yakni di Petobo dan Balaroa.

Merata

Selain lima provinsi itu, kerentanan likuefaksi menyebar di semua kota besar. Untuk Jakarta, hampir seluruh wilayah Jakarta Utara, sebagian Jakarta Barat dan Jakarta Pusat berwarna kuning. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, daerah-daerah pantai utara, termasuk Semarang, mayoritas kerentanannya sedang. Kerentanan Cilacap dan pesisir Kabupaten Kebumen cukup tinggi.

Demikian pula pesisir Kulon Progo dan Bantul di DI Yogyakarta. Sementara kerentanan Kota Yogyakarta sedang.

Di Jawa Timur, kerentanan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jombang, Gresik, dan Lamongan termasuk sedang. Tiga kabupaten yang memiliki zona rawan likuefaksi tinggi adalah Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Lumajang.

Kota Gorontalo di Sulawesi rentan likuefaksi sedang. Demikian juga sepanjang pesisir Kabupaten Mamuju Utara hingga sebelum Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Kota Palu, hampir seluruhnya merah.

Menurut Rudy, daerah rentan likuefaksi umumnya muda secara geologis.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Supriyadi menyatakan, atlas bisa menjadi referensi perencanaan tata ruang. Pemerintah berkomitmen mengkomodifikasi mitigasi bencana, termasuk kerentanan likuefaksi. (VDI)

7	Bisnis Indonesia Halaman 20	Kamis, 10 Oktober 2019	Beleid Likupang Ditekan	KEK Siap	Pemerintah bulan ini akan menetapkan kawan Likupang, kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi utara sebagai kawasan Ekonomi khusus (KEK).
---	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------	---

► DESTINASI SUPERPRIORITAS

Beleid KEK Likupang Siap Diteken

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah bulan ini akan menetapkan kawan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan bahwa peraturan pemerintah tentang KEK Likupang akan ditandatangani bulan ini.

“Iya kami berharap diteken Oktober ini,” katanya kepada *Bisnis*, Rabu (9/1).

Likupang memiliki beberapa daya tarik bagi wisatawan sehingga hal itu menjadi alasan dia dipilih sebagai salah satu destinasi superprioritas.

“Mulai dari Marina Area untuk tempat sandar *super yacht* dengan standar internasional. Lalu ada *cultural village*, dan Wallace Conservation dan Marine Tourism Park yang menjadi alasan wisatawan datang ke Likupang,” jelasnya.

Saat ini, imbuhnya, pemerintah te-

ngah melakukan pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar di wilayah tersebut. Mulai dari pembangunan infrastruktur transportasi udara, yaitu Bandara Sam Ratulangi.

Nantinya, landasan bandara ini akan diperpanjang menjadi 2.800 meter dari yang semula 2.600 meter. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pemugaran bandara menjadi hampir dua kali lipat dari 26.000 meter persegi menjadi 56.000 meter persegi.

Pembangunan kedua yaitu infrastruktur transportasi darat menuju lokasi KEK, pembangunan jalan *bypass* dari bandara menuju KEK Likupang sepanjang 31,5 km, pembangunan jalan non-tol, pelebaran jalan nasional Likupang—Girian sepanjang 12,7 km, dan pelebaran jalan akses pariwisata di Likupang sepanjang 3,2 km.

Sedangkan terkait rencana anggaran KEK Likupang yang telah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas, peme-

rintah menyiapkan anggaran senilai Rp773,71 miliar dari APBN 2020.

Guntur menuturkan adanya KEK Likupang ini diharapkan terjadi lonjakan jumlah wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara. Dia mengklaim, dalam 4 tahun terakhir, pariwisata Sulut tumbuh sebesar enam kali lipat atau 600% dengan kunjungan wisman ke Sulut meningkat enam kali lipat.

“Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta atau dua kali lipat, 200%, padahal di daerah lain hanya sekitar 5 sampai 10%,” kata Guntur.

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari mengatakan bahwa daya tarik Likupang masih rendah karena hanya fokus pada wisata alam. Padahal, tren karakter wisatawan sudah mulai bergeser dari yang tadinya “*sun-sand-sea*” menjadi *serenity-spirituality-sustainability*. (*Dewi*

A. Zuhriyah)

8	Bisnis Indonesia Halaman 22	Kamis, 10 Oktober 2019	Pengembangan Masih Tunggu Realisasi	Asosiasi Pengembangan Perumahan dan permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Masih menunggu realisasi tambahan kuota Fasilitas Likuiditas
---	-----------------------------------	------------------------------	---	--

► TAMBAHAN KUOTA FLPP

Pengembang Masih Tunggu Realisasi

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) masih menunggu realisasi tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sebesar 20.000 unit.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdullah mengatakan Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menyetujui penambahan anggaran FLPP sebesar Rp2 triliun atau untuk 20.000 unit.

Tambahan kuota tersebut sebenarnya masih di bawah usulan yang diajukan asosiasi yaitu 80.000 unit rumah. Meskipun demikian, asosiasi tetap menerima tambahan kuota untuk 20.000 unit agar kebutuhan rumah bersubsidi dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tetap terpenuhi.

Junaidi menyatakan asosiasi berharap agar tambahan

kuota tersebut bisa segera teralisasi, karena waktunya pelaksanaannya yang semakin sempit. Jika tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat, dia menilai program tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

"Masalahnya ini 2 bulan lagi sudah mau akhir tahun. Kalau lebih lama lagi realisasinya, nanti alasannya tidak terserap kuotanya, padahal persoalannya ada di pemerintah," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (9/10).

Pihaknya juga sudah meminta penjelasan kepada Kementerian PUPR terkait kendala yang dihadapi hingga tambahan kuota FLPP belum juga dapat direalisasikan hingga saat ini. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapat penjelasan.

Junaidi menegaskan jika tidak segera direalisasikan, hal itu akan berimbas ke-

pada para pengembang. Dia mengatakan para pengembang menggunakan kredit perbankan untuk pengerjaan konstruksi, dikhawatirkan akan meningkatkan rasio kredit bermasalah di perbankan, karena pengembang kesulitan menjual unit perumahannya.

Wakil Ketua Umum DPP Apersi Yoyo Sugeng Triyogo menambahkan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN sebenarnya telah menyetujui dana talangan sebesar Rp 2 triliun untuk tambahan kuota subsidi FLPP.

Namun, hingga saat ini Yoyo mengungkapkan BTN belum bisa melaksanakan hal tersebut, karena masih menunggu instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan.

Yoyo mengatakan upaya mendorong pemanfaatan

skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Namun, skema tersebut dinilai masih tidak akan populer di kalangan MBR.

Menurutnya, setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan BP2BT masih tidak populer di kalangan MBR.

Faktor pertama ialah karena sebenarnya suku bunga BP2BT adalah komersial. Kemudian, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diminta Dinas PU daerah justru belum siap dilaksanakan seluruh daerah. "Hanya beberapa kabupaten atau kota saja yang benar-benar sudah siap," ujarnya.

Selain itu, ketentuan yang mengatur bahwa minimum posisi tabungan untuk konsumen MBR dalam jangka waktu 6 bulan sejak pengajuan juga dinilai membe-
(Fitri Sartina Dewi/ Mutiara Nabila)